

**EFEKTIVITAS PROGRAM DANA BANTUAN TUNAI PKH
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT DI DESA TALAGA, KECAMATAN CIKUPA,
KABUPATEN TANGERANG**

**Effectiveness of the PKH Cash Assistance Program in
Empowering Beneficiary Families in Talaga Village,
Cikupa District, Tangerang Regency**

Muhammad Rafly Rafsanjani¹, Syadeli Hanafi², Ahmad Fauzi³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

raflyrafsanjani2000@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 12, 2025	Jun 7, 2025	Jun 19, 2025	Jun 24, 2025

Abstract

This study is motivated by ongoing doubts regarding the effectiveness of the *Program Keluarga Harapan* (PKH), a conditional cash transfer initiative by the government aimed at alleviating poverty among low-income families. The objective of the research is to assess the effectiveness of PKH cash assistance in empowering *Keluarga Penerima Manfaat* (KPM) or beneficiary families in Talaga Village, Cikupa Subdistrict, Tangerang Regency. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the PKH program has been moderately effective in both economic and social empowerment. Its effectiveness is reflected in the accurate targeting of beneficiaries, achievement of program goals, frequency of outreach, and continuity of monitoring efforts. The PKH funds have contributed to meeting the basic needs of KPMs, particularly in education and health sectors. However, challenges remain, including

limited community understanding of the program's objectives and instances of misallocation of funds. The study concludes that while PKH has had a positive impact on empowering KPMs, its effectiveness still requires improvement through enhanced outreach, supervision, and the integration of sustainable supporting programs. The implications provide strategic input for local governments and program implementers to improve governance and optimize the benefits of PKH.

Keywords: Effectiveness; *Program Keluarga Harapan*; Empowerment; Cash Assistance; Beneficiary Families (KPM)

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keraguan terhadap efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas bantuan tunai PKH dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH telah berjalan cukup efektif dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial. Efektivitas program tercermin dari ketepatan sasaran penyaluran bantuan yang menjangkau keluarga kurang mampu, pencapaian tujuan program, intensitas sosialisasi, serta keberlanjutan pemantauan. Dana bantuan PKH berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar KPM, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, masih terdapat hambatan seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program dan pemanfaatan dana yang kurang tepat. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun PKH memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan KPM, peningkatan efektivitas masih diperlukan melalui penguatan sosialisasi, pengawasan, dan integrasi program berkelanjutan. Implikasinya, hasil penelitian ini menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dan pelaksana program untuk memperbaiki tata kelola dan optimalisasi manfaat PKH.

Kata Kunci: Efektivitas; Program Keluarga Harapan; Pemberdayaan; Bantuan Tunai; Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah struktural yang berdampak pada rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 memberikan bantuan tunai bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (A Prichatin, 2019). Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang masih nyata di Indonesia, baik di wilayah urban maupun rural. Selain persoalan ekonomi, kemiskinan juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (Pratama, 2015). Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan sistem perlindungan sosial, sejak tahun 2007

pemerintah menginisiasi Program Keluarga Harapan (PKH), yakni program bantuan tunai bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui akses terhadap layanan dasar. PKH dirancang tidak hanya untuk membantu daya beli masyarakat miskin, melainkan juga mendorong perubahan perilaku melalui komitmen di bidang kesehatan dan pendidikan (Pertiwi, 2020).

Peserta program diwajibkan memenuhi syarat, seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi anak, dan memastikan kehadiran anak di sekolah minimal 85% dalam sebulan. Di tingkat lokal, Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan angka kemiskinan pada 2021, dengan persentase mencapai 7,12%. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, yang sejak 2011 telah menjalankan program PKH. Meskipun dikelilingi kawasan industri, masih banyak masyarakat Desa Talaga yang berpenghasilan rendah, dan sebanyak 126 kepala keluarga tercatat sebagai penerima PKH. Bantuan disalurkan dalam empat tahap per tahun dengan nominal Rp 450.000 per tahap (Tim BPS, 2022). Namun, pengamatan awal di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan bantuan. Sebagian penerima belum memahami sepenuhnya tujuan program, dan dana sering kali digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak mendukung peningkatan pendidikan dan kesehatan keluarga. Hal ini menjadi tantangan dalam mengukur efektivitas PKH sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat miskin.

Temuan awal dari observasi lapangan dan wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga penerima bantuan PKH di Desa Talaga memang menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan dasar seperti membeli makanan, membayar biaya sekolah, dan akses layanan kesehatan. Di Desa Talaga, PKH telah diterapkan sejak 2011, namun efektivitasnya dalam memberdayakan KPM secara sosial dan ekonomi masih menjadi pertanyaan. Hal ini karena belum banyak yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan jangka panjang, seperti usaha kecil atau pelatihan keterampilan. Selain itu, tingkat keterlibatan keluarga penerima dalam program pendampingan juga masih rendah, baik karena minimnya sosialisasi maupun kurangnya motivasi. Banyak KPM yang masih bersikap pasif dan menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan, yang menandakan belum terbangunnya kesadaran kemandirian secara menyeluruh. Hal ini didukung oleh penelitian (Masyhar & Alamsyah, 2021) bahwa program keluarga harapan dalam pemberdayaan keluarga penerima manfaat di Indonesia masih banyak yang salah dan belum memahami dengan baik penggunaannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program PKH dan realitas

di lapangan masih harus menjadi perhatian lebih lanjut. Maka dari itu fokus penelitian ini adalah terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dana bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya memberdayakan keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara mendalam, dengan fokus pada makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks sosial mereka. Penelitian kualitatif memandang realitas sebagai sesuatu yang kompleks, kontekstual, dan dinamis, yang hanya dapat dipahami melalui interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Sejalan dengan pendapat Danin dalam (Gunawan, 2022) bahwa pendekatan ini meyakini bahwa kebenaran bersifat relatif dan kontekstual, serta dapat diakses melalui pemahaman terhadap perilaku dan interaksi sosial. Menurut (Alasan, 2021), pendekatan kualitatif bertujuan untuk menyajikan realitas secara naratif dan deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik, tetapi melalui penafsiran terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada eksplorasi mendalam terhadap proses, makna, dan efektivitas pelaksanaan Program Dana Bantuan Tunai PKH dalam upaya pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha memotret secara rinci bagaimana PKH dilaksanakan, bagaimana respons masyarakat terhadap program tersebut, serta kendala dan peluang yang muncul dalam proses pemberdayaan.

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu dari 8 Januari hingga 10 Maret 2025 di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci secara terstruktur, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020). Dengan pendekatan ini,

diharapkan penelitian mampu menyajikan gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai efektivitas Program PKH dalam memberdayakan KPM, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan implementasi program ke depan.

HASIL

Efektivitas Program Dana Bantuan Tunai PKH dalam upaya pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa. Hasil penelitian disusun berdasarkan tiga fokus utama, yaitu efektivitas pelaksanaan program, proses penyaluran dana, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan. Efektivitas Pelaksanaan Program PKH di Desa Talaga dinilai telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan empat indikator: Ketepatan sasaran: Bantuan disalurkan kepada keluarga yang layak menerima berdasarkan data pusat, dengan verifikasi oleh pendamping PKH. Sosialisasi program: Dilakukan secara langsung maupun daring, dengan pertemuan rutin di tingkat desa dan kecamatan.



Gambar 1. Pendampingan Program Dana Bantuan Tunai PKH



Gambar 2. Pendampingan Program Dana Bantuan Tunai PKH

Pada gambar 1 dan 2 diatas terlihat pemerintah desa bersama mahasiswa melakukan pendampingan terkait program dana bantuan tunaik PKH agar berjalan dengan baik. terlihat juga di gambar tersebut untuk mengetahui secara detail tentang pemamfaatan bantuan tunai PKH tersebut. Pencapaian tujuan: Bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak. Pemantauan program: Evaluasi dilakukan secara berkala oleh pendamping dan tim pusat melalui kunjungan rumah dan peninjauan kepatuhan. Proses Penyaluran Dana Pelaksanaan program mengikuti alur yang telah ditetapkan, mulai dari validasi data, pemutakhiran, kunjungan rumah, hingga pencairan dana melalui bank. Proses ini dilengkapi dengan laporan bulanan dan koordinasi lintas sektor, yang melibatkan kepala desa, aparat kecamatan, serta BPJS dan lembaga pendidikan.

"Kami memastikan bahwa bantuan PKH ini benar-benar diberikan kepada keluarga yang memang layak menerima. Data penerima kami ambil dari pusat, tetapi tetap diverifikasi ulang di lapangan melalui kunjungan rumah oleh pendamping PKH," ungkap salah satu pendamping PKH di Desa Talaga.

“Sosialisasi program kami lakukan secara rutin, baik melalui pertemuan langsung di balai desa maupun secara daring, terutama selama masa pandemi. Kami juga bekerja sama dengan kecamatan untuk memastikan semua keluarga penerima memahami hak dan kewajiban mereka”Ungkap Kepala Desa

Dalam proses pelaksanaan dan hambatan implementasi program di tingkat lokal dapat dibagi dalam penjelasan berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Program PKH

- a. Ketepatan Sasaran Data menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH di Desa Talaga sebagian besar telah tepat sasaran. Pendamping PKH menyatakan bahwa data penerima yang berasal dari pusat cukup akurat dan telah menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Meskipun masih terdapat beberapa warga yang memenuhi syarat namun belum terdata, secara umum pelaksanaan telah sesuai dengan prinsip efektivitas program.
- b. Sosialisasi Program Sosialisasi PKH dilakukan melalui berbagai media, baik langsung maupun daring, seperti pertemuan di kantor desa maupun melalui aplikasi pesan instan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta PKH. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa informasi program telah diterima masyarakat meskipun terdapat kendala teknis seperti antrean atau keterbatasan tempat.
- c. Pencapaian Tujuan Program PKH secara umum telah membantu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Warga menyadari bahwa tujuan program adalah untuk mendukung kelompok rentan, termasuk anak usia sekolah dan balita. Efektivitas ini tercermin dari peningkatan partisipasi sekolah serta tersedianya perlengkapan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga KPM.
- d. Pemantauan dan Evaluasi Proses monitoring dilakukan secara rutin oleh pendamping dan tim dari pusat, termasuk kunjungan rumah dan pengecekan kepatuhan. Evaluasi ini penting untuk menjamin bahwa bantuan disalurkan kepada penerima yang aktif memenuhi syarat. Pendekatan ini mendukung teori efektivitas organisasi yang menekankan pentingnya feedback dan pengawasan dalam pencapaian tujuan program.

2. Proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Pelaksanaan penyaluran PKH di Desa Talaga dilakukan secara sistematis, mulai dari pendataan, validasi, sosialisasi, pemutakhiran data, hingga koordinasi lintas sektor. Berikut proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Talaga:

Tabel 1. Proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH)

Tahapan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan Tambahan
1. Pendataan	Identifikasi awal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak	Dilakukan oleh petugas PKH atau aparat desa
2. Validasi	Verifikasi dan validasi data KPM	Untuk memastikan data akurat dan tidak ganda
3. Sosialisasi	Penyampaian informasi terkait tujuan, hak, dan kewajiban dalam PKH	Menyasar KPM dan masyarakat umum
4. Pemutakhiran Data	Perbaruan data KPM sesuai kondisi terkini	Dilakukan secara berkala agar data tetap relevan
5. Koordinasi Lintas Sektor	Kolaborasi dengan pihak terkait seperti dinas sosial, pendidikan, dan kesehatan	Mendukung efektivitas dan kelancaran program
6. Pencairan Dana	Penyaluran dana bantuan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan	Dana dicairkan secara berkala sesuai jadwal
7. Dokumentasi dan Pelaporan	Pencatatan dan pelaporan setiap tahap proses	Dilaporkan secara berkala oleh petugas PKH
8. Evaluasi dan Masukan KPM	Ditemukan masukan teknis dari KPM terkait pelaksanaan penyaluran	Menjadi dasar perbaikan sistem teknis ke depan
Hasil Umum	Program berdampak positif terhadap kesejahteraan, khususnya pendidikan dan kesehatan anak	Pelaksanaan dinilai sesuai prosedur, meskipun masih perlu penyempurnaan teknis

Dari tabel 1 diatas maka secara umum terdapat delapan tahapan alur proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH). Pencairan dana dilakukan bekerja sama dengan lembaga keuangan, dan setiap tahap didokumentasikan melalui laporan berkala. Meski demikian, terdapat masukan dari KPM bahwa sistem penyaluran masih memerlukan perbaikan dari sisi teknis. Secara umum, pelaksanaan berjalan sesuai prosedur dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak.

3. Hambatan dalam Implementasi Program Meskipun PKH berjalan dengan cukup baik, terdapat beberapa kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program: Rendahnya Literasi Keuangan dan Teknologi Banyak KPM kesulitan menggunakan ATM atau mengakses informasi digital terkait bantuan. Hal ini mengindikasikan perlunya pelatihan dasar literasi finansial bagi penerima. Ketergantungan terhadap Bantuan Sebagian besar KPM belum menunjukkan kecenderungan untuk mandiri secara ekonomi. Bantuan masih dianggap sebagai sumber utama penghidupan, bukan sebagai instrumen transisi menuju pemberdayaan. Masalah Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ditemukan kasus di mana warga yang tidak lagi memenuhi syarat masih menerima bantuan, akibat lambannya proses

pembaruan data dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Minimnya Pendidikan dan Bimbingan Kewirausahaan Program PKH belum terintegrasi secara optimal dengan pelatihan keterampilan atau akses pembiayaan usaha kecil. Tanpa dukungan ini, KPM kesulitan membangun kemandirian ekonomi.

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertujuan agar mereka memiliki akses lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial lainnya sehingga nantinya mampu memafatkan dengan baik untuk kebutuhan dan peningkatan kehidupan kedepannya (Aguslida et al., 2021). Berdasarkan teori pembangunan sosial menurut (Midgley et al., 2016), bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan, yakni mendorong individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas program ini perlu dilihat tidak hanya dari sisi distribusi bantuan, tetapi juga dari hasil pemberdayaannya serta kemamfaatannya.

Di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, implementasi PKH telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar KPM menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan anak dan akses layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Syahdillah & Suriyani, 2023) yang menyatakan bahwa penggunaan bantuan PKH umumnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan primer sehingga dapat dikatakan mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari.

Secara ketepatan Sasaran Data menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH di Desa Talaga sebagian besar telah tepat sasaran. Pendamping PKH menyatakan bahwa data penerima yang berasal dari pusat cukup akurat dan telah menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Meskipun masih terdapat beberapa warga yang memenuhi syarat namun belum terdata, secara umum pelaksanaan telah sesuai dengan prinsip efektivitas program. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam teori kebijakan public sebagaimana penelitian (Lasmiatun, 2017) yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara merata kepada kelompok sasaran.

Selain itu, sosialisasi Program Sosialisasi PKH juga dilakukan melalui berbagai media, baik langsung maupun daring, seperti pertemuan di kantor desa maupun melalui aplikasi pesan instan. Tujuannya adalah selain masyarakat mengetahui mekanisme alur pendapatan PKH, juga mengetahui pencapaian tujuan Program PKH secara umum terutama dalam membantu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta PKH (Ririn Anjela, 2019).

Selain itu, dalam memenuhi target dan kesesuaian dari sosialisasi di atas, maka pemantauan dan evaluasi proses monitoring dilakukan secara rutin oleh pendamping dan tim dari pusat dan daerah, termasuk kunjungan rumah dan pengecekan kepatuhan. Evaluasi ini penting untuk menjamin bahwa bantuan disalurkan kepada penerima yang aktif memenuhi syarat. Pendekatan ini mendukung teori efektivitas organisasi yang menekankan pentingnya feedback dan pengawasan dalam pencapaian tujuan program sehingga nantinya dapat merasakan sebuah kemamfaatan bagi keperluan kehidupan (Gautama, B et al., 2020).

Dari segi proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Pelaksanaan penyaluran PKH di Desa Talaga dilakukan secara sistematis, mulai dari pendataan, validasi, sosialisasi, pemutakhiran data, hingga koordinasi lintas sektor. Pencairan dana dilakukan bekerja sama dengan lembaga keuangan, dan setiap tahap didokumentasikan melalui laporan berkala. Meski demikian, terdapat masukan dari KPM bahwa sistem penyaluran masih memerlukan perbaikan dari sisi teknis. Secara umum, pelaksanaan berjalan sesuai prosedur dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Walaupun dari segi terkait peningkatan ekonomi masih tergolong rendah karena beranggapan bahwasanya PKH sebagai acuan kebutuhan sehari-hari, sehingga masih sedikit yang mengembangkan di sector lainnya seperti pengembangan usaha kecil dan lainnya. Hal ini sesuai menurut teori pemberdayaan dari (Hamid, 2018) dan (Aziz, 2016), bahwa pemberdayaan melibatkan proses peningkatan kontrol individu terhadap kehidupan mereka, termasuk kemampuan mengambil keputusan dan mengakses sumber daya. Sehingga apabila bantuan PKH dimaksimalkan maka bukan hanya berdampak pada kebutuhan primer, tetapi juga pengembangan yang berdampak pada kebutuhan sekunder. Dimana dalam hal ini KPM di Desa Talaga belum menunjukkan indikasi kemandirian dalam pengelolaan keuangan pengembangan usaha kecil yang banyak, sehingga ini menunjukkan bahwa aspek

pengembangan dana PKH masih belum mampu ke tahap tersebut, dan hanya mampu di kebutuhan primer atau pokok.

Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi aktif dari penerima manfaat itu sendiri. Banyak KPM yang bersikap pasif dan hanya menunggu bantuan datang, tanpa adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Sikap ini diperkuat oleh budaya ketergantungan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan teori perilaku sosial, rendahnya motivasi internal dan ekspektasi terhadap perubahan dapat menghambat proses pemberdayaan (Andari, 2020). Maka dari itu, strategi komunikasi dan motivasi yang tepat perlu itu penting diterapkan agar penerima bantuan tidak hanya menerima, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan PKH ke depannya (Amalia, 2022). Sehingga, permasalahan diatas termasuk bagian dari hambatan dalam implementasi Program PKH, meskipun secara umum telah berjalan dengan baik

Selain itu, faktor lainnya adalah karena rendahnya literasi keuangan dan teknologi. Banyak KPM kesulitan menggunakan ATM atau mengakses informasi digital terkait bantuan. Hal ini mengindikasikan perlunya pelatihan dasar literasi finansial bagi penerima. Sehingga, ketergantungan terhadap Bantuan Sebagian besar KPM belum menunjukkan kecenderungan untuk mandiri secara ekonomi. Bantuan masih dianggap sebagai sumber utama penghidupan, bukan sebagai instrumen transisi menuju pemberdayaan ekonomi yang lebih baik. Maka dari itu, pendidikan dan bimbingan kewirausahaan Program PKH belum terintegrasi secara optimal dengan pelatihan keterampilan atau akses pembiayaan usaha kecil perlu ditingkatkan (Kandati et al., 2019).

Untuk meningkatkan efektivitas program PKH, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat kolaborasi antar sektor. Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pendamping PKH, dan lembaga pelatihan harus bekerja sama dalam menyusun program pendukung yang berkelanjutan. Selain itu, pelibatan komunitas lokal, seperti kelompok ibu rumah tangga dan karang taruna, dapat menjadi strategi untuk memperkuat jejaring sosial dan mendukung pemberdayaan berbasis masyarakat (Lubis & Zubaidah, 2020). Kolaborasi ini juga dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendorong partisipasi aktif dan saling dukung antar warga (Margayaningsih, 2018).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Dana Bantuan Tunai PKH di Desa Talaga lebih pada aspek bantuan konsumtif atau kebutuhan utama. Dari segi penyaluran, pelaksanaan tujuan hingga prosedur sudah berjalan

dengan baik dan sesuai dari pusat termasuk tujuannya sebagaimana peraturan pemerintah pusat dari kementerian (Kementerian Sosial, 2021). Hanya saja, aspek pemberdayaan dari sisi peningkatan kapasitas ekonomi, dan pendampingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan PKH ini untuk membuat hal-hal baru seperti usaha mandiri masih kurang maksimal. Hanya sedikit dari masyarakat yang menggunakan bantuan untuk keperluan pengembangan ekonomi. Sehingga dari itu, diperlukan intervensi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar program ini benar-benar menjadi alat pemberdayaan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat (Amanda, 2022).

Implikasi dari penelitian ini bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dan sering bantuan diberikan, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut mampu mendorong perubahan perilaku, kemandirian bagi kebutuhan primer dan sekunder, serta peningkatan kapasitas ekonomi keluarga penerima manfaat. Hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi antara bantuan tunai dan program pemberdayaan berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan intensif, dan akses pada sumber daya ekonomi produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan lainnya selain kebutuhan primer atau utama. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pendamping sosial agar dapat menjalankan peran sebagai fasilitator perubahan sosial secara lebih efektif. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat melengkapi data menggunakan penelitian kuantitatif dan juga perbandingan antara daerah sehingga dapat menjadikan program PKH lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Dana Bantuan Tunai Keluarga Harapan (PKH) di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, telah menunjukkan efektivitas dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara ekonomi dan sosial. Efektivitas tersebut tercermin dari beberapa aspek berikut: ketepatan sasaran dan implementasi program penyaluran bantuan PKH telah tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, tujuan program, intensitas sosialisasi, serta keberlanjutan pemantauan berkala. Seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan program secara prosedural dan terstruktur prosedur pelaksanaan PKH dilakukan secara sistematis melalui tahapan observasi, validasi,

pemutakhiran data, kunjungan lapangan, verifikasi, dan pertemuan kelompok. Kegiatan ini diikuti oleh koordinasi lintas sektor, termasuk keterlibatan bank penyalur dan pelaporan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PKH berjalan sesuai dengan standar operasional program. Selain itu, program PKH juga telah membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan dan kesehatan, efektivitas pemberdayaan ekonomi. Dengan bantuan dana PKH tersebut menjelaskan memiliki kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi KPM. Hambatan dalam pelaksanaan meskipun pelaksanaan program tergolong efektif, masih terdapat beberapa hambatan seperti rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan KPM, tingginya ketergantungan pada bantuan, serta belum optimalnya pemutakhiran data penerima. Di samping itu, absennya pelatihan kewirausahaan menjadi penghalang bagi KPM untuk berkembang secara mandiri.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian data lapangan yang menunjukkan secara langsung bagaimana 1) bantuan tunai bersyarat dari pemerintah berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. 2) Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai perubahan yang terjadi pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan rumah tangga setelah menerima bantuan. 3) Penelitian ini mengungkap hambatan-hambatan yang dialami oleh penerima dalam mencapai kemandirian, seperti keterbatasan akses pelatihan keterampilan dan kurangnya pendampingan intensif. Saran untuk penguatan pelaksanaan Program PKH meliputi: Peningkatan Partisipasi dan Pemanfaatan Bantuan KPM diharapkan dapat lebih optimal dalam memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan. Kehadiran aktif dalam pertemuan kelompok juga penting untuk memperkuat kapasitas pemahaman terhadap program. Peningkatan Peran Pendamping Pendamping PKH diharapkan dapat lebih intensif dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada KPM, dengan menekankan nilai kemandirian dan pentingnya transisi dari penerima menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Penguatan Intervensi Ekonomi Program PKH perlu dilengkapi dengan inisiatif penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan, agar KPM tidak terus bergantung pada bantuan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar lebih fokus pada (1) analisis longitudinal terhadap dampak jangka panjang program PKH terhadap kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat, sehingga dapat diketahui sejauh mana program ini mampu mengurangi ketergantungan dan mendorong keberdayaan yang berkelanjutan. (2) Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji peran pendamping sosial secara lebih mendalam dalam proses pemberdayaan, termasuk strategi komunikasi, pelatihan, serta monitoring yang

dilakukan terhadap KPM. (3) Selain itu, studi lanjutan dapat memperluas wilayah kajian ke beberapa desa lain untuk melakukan perbandingan antarwilayah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan implementasi program PKH dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan pendekatan kuantitatif dengan instrumen terstandar untuk mengukur tingkat pemberdayaan secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A Prichatin. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*. IAIN Purwokerto.
- Aguslida, Y., Masrul, M., & Firdawati, F. (2021). Analisis Implementasi Family Development Session (FDS) tentang Gizi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga. *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)*, 7(2), 71–86. <https://doi.org/10.33653/jkp.v7i2.497>
- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, F. M. (2022). *Perang Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62046>
- Amanda, O. (2022). The Role of Leadership in the Program Keluarga Harapan (PKH) in Kadudampit Village, Sukabumi Regency, West Java. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(2), 55. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/1514>
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa: Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 17. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2200>
- Aziz, M. A. dkk. (2016). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Pustaka Pesantren.
- Gautama, B. P., Yulawati, A., Nurhayati, N., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 335–369. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/414>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel).
- Kandati, F., Mantiri, M., & Monintja, D. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kampung BatuSenggo (Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang)*. 3(3), 103. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23888>
- Kementrian Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*.

Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Lasmiatun, L. (2017). Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif. *Dimensi: Jurnal OF Sosiologi*, 10(2), 139. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3760>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(2), 88–99. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140>
- Masyhar, C. T., & Alamsyah, M. N. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. *Katalogis*, 9(1), 35–46. <https://core.ac.uk/download/pdf/478960946>
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Midgley, Carol, K., Avi, & Middleton, M. (2016). Performance-approach goals: Good for what, for whom, under what circumstances, and at what cost? *Journal of Educational Psychology*, 93(1), 77. <https://psycnet.apa.org/buy/2001-16705-008>
- Pertiwi, D. A. (2020). *Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Kec. Bilah Hhulu Kab. Labuhanbatu)* [UIN Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/11454/>
- Pratama, Y. C. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA. *ESENSI*, 4(2), 39. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Ririn Anjela. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/20725/>
- Syahdillah, A., & Suriyani. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 6(1), 92–102. <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/740>
- Tim BPS. (2022). *Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2021*. Badan Pusat Statistika. <https://tangerangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/25/57/kemiskinan-kabupaten-tangerang-tahun-2021.html>